

PATRIARKI DAN DISKRIMINASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: MENGANALISIS PEMERINTAHAN INDONESIA MELALUI IDEOLOGI FEMINISME

Abim Sastrawan

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, Indonesia

abimsastrawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami makna ideologi feminisme dalam konteks pemerintahan Indonesia serta bagaimana sistem patriarki termanifestasi dalam kebijakan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan nasional seperti RPJMN dan RAN PUG, laporan lembaga pemerintah, serta publikasi akademik dan internasional. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi feminisme dalam pemerintahan Indonesia masih beroperasi di bawah dominasi patriarki yang terinstitusionalisasi, sehingga kebijakan kesetaraan gender cenderung bersifat simbolik. Meskipun terdapat resistensi feminis melalui advokasi kebijakan, perubahan struktural belum signifikan. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi institusional berbasis gender yang menggeser paradigma kebijakan dari proteksi menuju emansipasi serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

Kata Kunci: Feminism; Kebijakan publik; Kesetaraan gender; Patriarki

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, isu feminisme dan kesetaraan gender semakin mendapat perhatian global, terutama terkait kesenjangan upah, representasi politik perempuan, dan bias gender dalam kebijakan publik (Eriyanti & Makmur, 2025). Meskipun pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan pendidikan mengalami kemajuan, ketimpangan struktural yang berakar pada ideologi patriarki masih kuat di berbagai negara, termasuk Indonesia (World Economic Forum, 2024). Patriarki sebagai sistem yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan turut memengaruhi konstruksi sosial dan kebijakan publik (Ispriyarso et al., 2025).

Dalam konteks global, gerakan *governance feminism* mendorong integrasi perspektif feminis dalam proses perumusan kebijakan publik guna mengoreksi bias gender dalam struktur pemerintahan yang maskulin dan hierarkis (Whipkey et al., 2025). Namun, implementasinya menghadapi tantangan besar di negara yang masih dipengaruhi budaya patriarki dan nilai konservatif, termasuk Indonesia (Yunazwardi & Ikawati, 2025). Patriarki tidak hanya hidup dalam praktik sosial, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam kebijakan yang kurang sensitif terhadap gender (Kania et al., 2025). Fenomena tersebut terlihat dari masih tingginya ketimpangan gender di Indonesia. Data Bappenas (2024) menunjukkan disparitas dalam partisipasi politik dan ekonomi, di mana perempuan hanya menempati 21% kursi DPR periode 2019–2024. Selain itu, perempuan masih banyak bekerja di sektor informal dengan perlindungan hukum yang terbatas (Adnyani & Parwati, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan belum sepenuhnya terimplementasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik maupun kehidupan sosial di Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masalah kesetaraan gender tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terkait dengan ideologi yang memengaruhi pembentukan kebijakan. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, sementara perempuan dibatasi pada peran domestik (Putri, 2022). Dalam perspektif feminisme kritis, kondisi ini melahirkan “hegemoni gender” yang mereproduksi subordinasi perempuan melalui kebijakan publik (Rosdiana & Pratiwi, 2025). Oleh karena itu, pendekatan feminis diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan representasi perempuan, tetapi juga untuk mengubah logika dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaruh patriarki juga tampak dalam praktik hukum dan kebijakan publik. Kania dkk. (2025) menemukan adanya bias gender dalam putusan pengadilan agama, sementara Ispriyarso dkk. (2025) menyoroti kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Di sisi lain, stereotip gender juga diperkuat

melalui media, pendidikan, dan kebijakan sosial (Gunawan, 2025), meskipun inklusivitas gender merupakan syarat penting bagi pembangunan berkelanjutan (Phelan et al., 2022). Meskipun kajian gender dan kebijakan publik telah berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada representasi perempuan dan implementasi *gender mainstreaming*. Kajian yang menghubungkan ideologi feminisme, patriarki, dan praktik pemerintahan di Indonesia masih terbatas (Lux, 2024). Oleh karena itu, terdapat *literature gap* dalam memahami bagaimana feminisme dapat menjadi lensa kritis terhadap praktik pemerintahan patriarkal.

Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan kualitatif dengan mengeksplorasi hubungan antara feminisme, patriarki, dan kebijakan publik di Indonesia. Melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana ideologi feminisme hadir dalam proses formulasi kebijakan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna bersama (Creswell & Poth, 2023). Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan feminisme kritis dalam konteks negara berkembang, sementara secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai ideologi feminisme dalam konteks pemerintahan Indonesia dan kritik terhadap sistem patriarki dalam kebijakan publik berakar pada pemikiran teoritik feminisme kritis yang menyoroti hubungan kekuasaan berbasis gender. Feminisme, dalam pandangan Tong (2018), merupakan kerangka berpikir yang berupaya menantang struktur sosial yang menindas perempuan melalui sistem patriarki yang mengakar dalam budaya, politik, dan ekonomi. Patriarki, sebagaimana dijelaskan (Walby, 1990), adalah sistem sosial di mana laki-laki mendominasi posisi otoritas dan kontrol, baik dalam ranah publik maupun privat. Dalam konteks Indonesia, ideologi patriarki tampak melekat dalam praktik pemerintahan, pembentukan kebijakan publik, dan bahkan dalam representasi perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif (Lestari & Kurniawan, 2025).

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan kesetaraan gender, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural berupa budaya patriarkal yang kuat (Nurmiati, 2025). Fitriyah (2025) menegaskan bahwa ideologi feminisme dalam konteks hukum dan kebijakan publik di Indonesia sering kali dipersepsikan sebagai upaya "tambahan" yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Sementara itu, penelitian oleh Sadiyatunnimah & Purba (2025) di Bali menunjukkan bahwa pola kepemimpinan tradisional berbasis patriarki membatasi representasi politik perempuan, meskipun terdapat kebijakan afirmatif seperti kuota 30%.

Dalam ranah teori, *Feminist Institutionalism* menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami dinamika ini. Teori ini, sebagaimana dikembangkan oleh Mackay dkk. (2010), menekankan bahwa institusi politik tidak netral terhadap gender, melainkan membentuk dan dibentuk oleh relasi kekuasaan berbasis gender. Pendekatan ini melihat bagaimana norma-norma patriarkal terinternalisasi dalam prosedur, struktur, dan praktik pemerintahan, yang menyebabkan marginalisasi perempuan dalam pengambilan keputusan (Prasetyo & Permana, 2025). Dalam konteks Indonesia, teori ini menjelaskan mengapa kebijakan yang tampak netral secara gender justru sering memperkuat ketimpangan karena tidak menantang struktur sosial yang menindas.

Sejumlah penelitian internasional dan nasional mendukung temuan ini. Bilqista & Setijaningrum (2025) menyoroti bahwa efektivitas kebijakan gender di Indonesia masih terbatas akibat lemahnya pelibatan perempuan dalam proses formulasi kebijakan. Eriyanti & Makmur (2025) menambahkan bahwa patriarki bahkan mewarnai kebijakan yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan, seperti kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan. Sementara itu, Harianto & Listyani (2025) menemukan bahwa pemberdayaan perempuan di pedesaan masih terhambat oleh struktur ekonomi dan sosial patriarkal, meskipun berbagai program afirmatif telah diterapkan. Studi internasional oleh Nurmiati (2025) juga menunjukkan fenomena serupa di Asia Timur, di mana indikator kesetaraan gender menurun akibat resistensi struktural terhadap perubahan sosial.

Namun demikian, terdapat kesenjangan teoretis dan yang signifikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi masih fokus pada aspek kuantitatif kesetaraan gender — seperti tingkat partisipasi atau jumlah perempuan di parlemen — tetapi belum banyak menggali makna ideologis feminisme dalam praktik pemerintahan dan proses formulasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian sebelumnya belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana ideologi feminisme dapat diartikulasikan sebagai kritik terhadap sistem patriarki yang tersembunyi dalam struktur institusional negara Ikhsan dkk. (2025). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam konstruksi ideologi feminisme dalam kebijakan publik Indonesia serta strategi perlawanan terhadap patriarki di dalamnya.

Berdasarkan uraian teoritik di atas, penelitian ini menggunakan Teori *Feminist Institutionalism* sebagai kerangka konseptual utama. Teori ini relevan karena menekankan pentingnya analisis terhadap struktur, norma, dan praktik institusional yang mempertahankan ketimpangan gender. Tiga indikator utama yang digunakan dalam analisis ini meliputi:

1. Struktur Kekuasaan Gender – mengacu pada distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam institusi pemerintahan;
2. Norma dan Praktik Institusional – mencakup aturan formal dan informal yang meneguhkan dominasi laki-laki;
3. Resistensi dan Transformasi Feminisme – meliputi strategi perempuan dan kelompok feminis dalam menantang sistem patriarki melalui kebijakan publik dan partisipasi politik.

Kerangka konseptual ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana ideologi feminisme tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga praktik politik yang berupaya mengubah struktur kekuasaan patriarkal di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori feminisme

dalam konteks pemerintahan negara berkembang serta menawarkan pemahaman baru mengenai praktik non-diskriminasi dalam kebijakan publik Indonesia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis yang bertujuan memahami makna ideologi feminisme dalam konteks pemerintahan Indonesia serta bagaimana sistem patriarki terwujud dalam kebijakan publik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap makna sosial, politik, dan budaya di balik data (Creswell & Poth, 2023). Fokus penelitian bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengungkap proses dan dinamika yang membentuk ideologi feminisme dalam praktik kebijakan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan data sekunder, meliputi analisis terhadap dokumen kebijakan (seperti RPJMN, RAN PUG, dan regulasi kesetaraan gender), artikel ilmiah, laporan lembaga pemerintah, serta publikasi dari organisasi internasional seperti UN Women. Penggunaan data sekunder dipilih karena memberikan konteks historis dan kebijakan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti (Rosdiana & Pratiwi, 2025). Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan berbagai jenis dokumen dan sumber literatur untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi (Sugiyono, 2022). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dkk. (2014) yang mencakup tiga tahap utama: (1) *data reduction* untuk menyeleksi dan mengelompokkan informasi relevan, (2) *data display* melalui penyusunan matriks dan narasi tematik, serta (3) *conclusion drawing/verification* untuk menarik kesimpulan yang valid berdasarkan pola dan hubungan antarkategori. Pendekatan ini menjamin proses analisis yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi secara terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Feminisme dan Struktur Patriarki dalam Pemerintahan Indonesia

Hasil analisis terhadap dokumen kebijakan nasional, laporan lembaga pemerintah, dan publikasi akademik menunjukkan bahwa ideologi feminisme dalam pemerintahan Indonesia masih beroperasi dalam kerangka patriarki yang kuat, di mana perempuan diposisikan lebih sebagai objek kebijakan daripada subjek perubahan sosial. Berdasarkan analisis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN PUG), ditemukan bahwa narasi kesetaraan gender memang disebut secara eksplisit, namun masih bersifat normatif tanpa strategi yang konkret untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan patriarkal (Bappenas, 2024).

Dalam kerangka Teori *Feminist Institutionalism*, temuan ini menunjukkan bahwa institusi pemerintahan Indonesia masih menampilkan bias gender struktural — sesuai dengan indikator pertama teori ini, yaitu struktur kekuasaan gender. Struktur tersebut terwujud melalui dominasi laki-laki dalam posisi pengambil keputusan strategis. Data Bappenas (2024) memperlihatkan bahwa dari 102 jabatan eselon I di kementerian/lembaga, hanya 18% diisi oleh perempuan. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang menjamin kesetaraan, implementasinya tidak mampu menembus lapisan budaya birokrasi yang bersifat maskulin. Tabel berikut merangkum hasil kategorisasi tema-tema utama berdasarkan tiga indikator *teori Feminist Institutionalism* (Mackay et al., 2010):

Tabel 1. Temuan Indikator Teori *Feminist Institutionalism* dalam Kebijakan Publik Indonesia

Indikator Teori	Tema Temuan Utama	Deskripsi Temuan	Data Sekunder
Struktur Kekuasaan Gender	Dominasi laki-laki dalam birokrasi dan kebijakan publik	Representasi perempuan di tingkat pengambil keputusan masih <25%; kebijakan sensitif gender sering diabaikan dalam penyusunan APBN	(Bappenas, 2024; BPS, 2023)
Norma dan Praktik Institusional	Patriarki dalam desain kebijakan publik	Pengarusutamaan gender dijadikan formalitas administratif, bukan pendekatan substantif	RPJMN 2020–2024; RAN PUG ((KemenPPPA), 2021)
Resistensi dan Transformasi Feminisme	Gerakan feminisme kebijakan (<i>policy feminism</i>) masih bersifat sektoral	Inisiatif gender banyak lahir dari NGO dan lembaga internasional, bukan internal pemerintah	(Eriyanti & Makmur, 2025; Indonesia, 2023)

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

2. Feminisme sebagai Ideologi Kebijakan yang Terfragmentasi

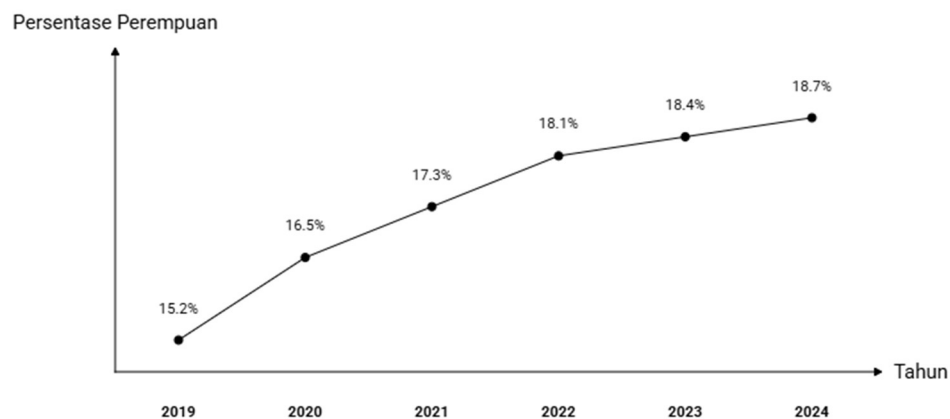
Dari hasil analisis dokumen RPJMN dan laporan Bappenas, muncul pola tematik bahwa ideologi feminisme dalam kebijakan nasional Indonesia belum terintegrasi lintas sektor. RAN PUG, misalnya, memang mengusung prinsip *gender mainstreaming*, tetapi dalam pelaksanaannya masih berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan, tanpa

menyentuh dimensi politik atau ideologis. Hal ini menunjukkan keterbatasan paradigma feminisme yang diterapkan secara parsial. Eriyanti & Makmur (2025) menyoroti bahwa feminisme dalam birokrasi Indonesia sering kali diterjemahkan sebagai “pemberdayaan perempuan” (*women empowerment*), bukan sebagai upaya dekonstruksi sistemik terhadap relasi kekuasaan gender. Dengan demikian, meskipun kebijakan tersebut menggunakan istilah feminis, ideologi yang menopangnya tetap patriarkal.

Temuan ini juga mengonfirmasi penelitian Fitriyah (2025) yang menyatakan bahwa ideologi feminisme di parlemen dan lembaga hukum Indonesia cenderung dimoderasi oleh nilai-nilai patriarkal dan religius, sehingga tidak mampu menjadi kekuatan transformasional. Dalam konteks ini, feminisme menjadi ideologi yang “terfragmentasi” dan beroperasi di bawah kontrol sistem dominan — fenomena yang dikenal sebagai *institutional co-optation* dalam *Feminist Institutionalism*.

a) Analisis Struktur Kekuasaan Representasi Gender

Sebagai pendukung temuan kualitatif, analisis terhadap data BPS dan Bappenas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam jabatan publik mengalami peningkatan lambat dalam lima tahun terakhir. Grafik di bawah memperlihatkan tren proporsi perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan (2019–2024):



Gambar 1. Tren Proporsi Perempuan dalam Jabatan Struktural Pemerintahan Indonesia (2019–2024)

Sumber: (Bappenas, 2024; BPS, 2023)

Grafik ini memperlihatkan peningkatan yang lambat, dengan rata-rata pertumbuhan hanya sekitar 0.7% per tahun. Kondisi tersebut memperkuat temuan kualitatif bahwa perubahan struktural di tingkat birokrasi belum mengarah pada transformasi signifikan. Dalam kerangka teori *Feminist Institutionalism*, hal ini menggambarkan bahwa struktur institusi formal masih dikendalikan oleh norma-norma patriarkal yang resisten terhadap transformasi gender.

b) Normalisasi Patriarki dalam Norma dan Praktik Institusional

Analisis terhadap dokumen hukum dan kebijakan (termasuk UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN) menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pemerintah Indonesia telah berkomitmen terhadap prinsip non-diskriminasi, praktik institusional masih bias gender. Salah satu bentuk bias tersebut adalah penggunaan bahasa kebijakan yang menempatkan perempuan dalam posisi “penerima manfaat,” bukan “aktor perubahan.” Misalnya, dalam program-program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), istilah seperti “perempuan rentan” atau “kelompok terlindungi” sering digunakan — menunjukkan pendekatan paternalistik yang berakar dari paradigma patriarki (Prasetyo & Permana, 2025). Pendekatan ini menegaskan bahwa kesetaraan gender masih dilihat dari perspektif proteksi, bukan emansipasi. Dalam konteks teori *Feminist Institutionalism*, fenomena ini menggambarkan indikator kedua — *norma dan praktik institusional* — di mana patriarki berfungsi sebagai mekanisme kultural yang menormalisasi subordinasi perempuan dalam sistem birokrasi negara.

c) Resistensi Feminisme dan Upaya Transformasi Kebijakan

Meskipun sistem patriarki masih dominan, temuan juga memperlihatkan adanya upaya resistensi feminis dari kalangan akademisi, LSM, dan organisasi internasional. UN Women Indonesia (2023) dan lembaga seperti Komnas Perempuan memainkan peran penting dalam mendorong penyusunan kebijakan berbasis kesetaraan, seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Peraturan Presiden tentang Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Nasional (2023). Resistensi feminis ini

menunjukkan bahwa gerakan feminisme kebijakan di Indonesia bergerak dari luar sistem formal menuju ruang advokasi publik (*policy advocacy feminism*). Meski belum terlembaga penuh, gerakan ini memperlihatkan potensi transformasi dengan memanfaatkan mekanisme internasional dan wacana hak asasi manusia untuk menekan pemerintah agar lebih akuntabel terhadap komitmen kesetaraan (Yunazwardi & Ikawati, 2025).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa resistensi tersebut sering kali bersifat temporer dan tidak terintegrasi lintas sektor. Upaya feminis yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil tidak selalu mendapat dukungan institusional, bahkan terkadang mengalami resistensi dari aparat negara yang masih berpandangan konservatif (Gunawan, 2025). Dengan demikian, feminisme dalam konteks kebijakan publik Indonesia masih beroperasi di ruang yang sempit — antara simbolisme normatif dan perjuangan substantif.

3. Keterkaitan Teori dan Temuan

Berdasarkan tiga indikator teori *Feminist Institutionalism* — struktur kekuasaan gender, norma institusional, dan resistensi feminisme — hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi feminisme dalam pemerintahan Indonesia berada dalam fase kooptasi institusional, bukan transformasi struktural. Negara mengadopsi bahasa feminisme melalui kebijakan kesetaraan gender, tetapi tetap mempertahankan sistem patriarkal sebagai basis legitimasi sosial. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian internasional oleh Way (2022) yang menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara menghadapi dilema antara modernisasi gender dan pelestarian nilai-nilai patriarkal. Dalam konteks Indonesia, dilema ini muncul melalui dualitas antara komitmen terhadap konvensi internasional (seperti CEDAW) dan realitas sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

Dari sisi teoritik, penelitian ini memperluas aplikasi *Feminist Institutionalism* dalam konteks negara berkembang dengan menunjukkan bahwa ideologi feminisme dapat berfungsi sebagai “kritik internal” terhadap birokrasi patriarkal. Sementara dari sisi

praktis, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi institusional berbasis gender yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis — dengan memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan merombak struktur nilai dalam kebijakan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ideologi feminisme dalam pemerintahan Indonesia masih berada di bawah dominasi sistem patriarki yang terinstitusionalisasi dalam struktur kekuasaan dan norma birokrasi negara. Meskipun kebijakan nasional seperti RPJMN dan RAN PUG mengusung komitmen terhadap kesetaraan dan non-diskriminasi gender, penerapannya masih bersifat simbolik dan belum mampu menembus akar ideologis patriarki. Perempuan masih lebih sering diposisikan sebagai penerima kebijakan ketimbang aktor transformasi sosial. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan Teori *Feminist Institutionalism*, yang menjelaskan bagaimana relasi kuasa patriarkal beroperasi melalui struktur dan praktik institusional. Tiga indikator utama — struktur kekuasaan gender, norma institusional, dan resistensi feminisme — menunjukkan bahwa feminisme di Indonesia cenderung mengalami kooptasi institusional (*institutional co-optation*), di mana bahasa kesetaraan diadopsi tanpa perubahan substansial pada sistem nilai dan kekuasaan.

Dari sisi praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi institusional berbasis gender dengan memperkuat representasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta mengubah paradigma kebijakan dari proteksi menuju emansipasi. Feminisme perlu ditempatkan sebagai ideologi kebijakan (*policy ideology*) yang menantang dominasi patriarki, bukan sekadar strategi teknokratis Pembangunan. Penelitian ini juga merekomendasikan studi lanjutan dengan pendekatan kualitatif lapangan dan analisis etnografi kebijakan di tingkat daerah untuk menggali lebih dalam dinamika resistensi feminis. Dengan demikian, feminisme dapat menjadi landasan ideologis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusi, adil, dan berkeadilan gender.

REFERENSI

- (KemenPPPA), K. P. P. dan P. A. (2021). *Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN PUG) 2020–2024*. KemenPPPA.
- Ega Parwati, N. P., Sari Adnyani, N. K., Ayu Apsari Hadi, I. G., Ayu Ariyani, N. K., Eka Sidi Artama, G., Putri Dinda Ayu Tina Toon, K., ... & Ari Laksmi Utami, L. G. (2025). Legal Implications of Contract Marriage between Foreign Nationals and the Indigenous People of Bali. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 221, p. 03012). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103012>
- Bappenas. (2024). *Laporan Gender dan Pembangunan Nasional 2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bilqista, A. N., & Setijaningrum, E. (2025). Effectiveness of Gender Policy in Indonesia: A Review of the Achievement of Sustainable Development Goals (SDG's). *Journal of Social and Policy Issues*, 12(2), 45–58. <https://doi.org/10.58835/jspi.v5i2.434>
- BPS. (2023). *Statistik Gender Indonesia 2019–2023*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5 (ed.)). Sage Publications.
- Eriyanti, L. D., & Makmur, M. H. (2026). Realizing Gender Responsive Human Rights Through Governance Feminism. *Sexuality, Gender & Policy*, 3(1), 41–55. <https://doi.org/10.1002/sgp2.70041>
- Fitriyah, A. (2025). Feminism in Legislation: The Urgency of Legal Reform to Enhance Women's Representation in Indonesia's Legislative Institutions. *Sinergi International Journal of Law*, 3(2), 78-91. <https://doi.org/10.61194/law.v3i2.746>
- Forum, W. E. (2024). *Global Gender Gap Report 2024*. World Economic Forum.
- Gunawan, W. (2025). At the Crossroads of Religious Freedom and Women's Equal Rights. *CHEVRA: Research Journal of Social and Humanities*, 1(1), 15-35.
- Hariato, S., & Listyani, R. H. (2025). Empowering marginalised women in rural Indonesia: a multifaceted approach. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 45(9-10), 959-980. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2025-0111>
- Ikhsan, I., Hajad, V., Saputra, I. M., Herizal, H., & Latif, I. R. (2025). Governance-driven solutions for women's empowerment in the mining sector: tackling gender inequality through inclusive policies. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 6(1), 1-22. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v6i1.647>
- Indonesia, U. N. W. (2023). *Gender Equality and Women's Empowerment in Indonesia: Policy Brief*. UN Women Indonesia.
- Ispriyarso, B., Purwanti, A., & Wibawa, L. (2025). Patriarki dalam Kebijakan Publik: Analisis Bias Gender dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmu*

Pemerintahan Dan Kebijakan Publik, 10(1), 55–73.

Yusuf, N., Azizah, N., & Hasan, F. (2023). Feminism Analysis of Judges' Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts. *Al-'Adalah*, 20(2), 283-308. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.16177>

Lestari, P., & Kurniawan, G. F. (2025). Intersectionality and political representation: Challenges and policy implications for marginalized women in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 16(2), 1-38.

Lux, T. (2024). Integrating Gender Equality into Public Policy: Lessons from the European Union Framework. *Policy and Society*, 43(2), 211–229.

Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. (2010). New Institutionalism through a Gender Lens: Towards a Feminist Institutionalism? *International Political Science Review*, 31(5), 573–588.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Nurmiati, D. R. (2025). RPJPN 2025-2045: Women as Subject or Object of Development?. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1). <http://dx.doi.org/10.62870/jap.v16i1.32060>

Phelan, A., True, J., Gayatri, I. H., Marddent, A., Riveros Morales, Y., & Gamao, S. J. (2022). Gender analysis of violent extremism and the impact of COVID-19 on peace and security in ASEAN: Evidence-based research for policy.

Permana, A., & Prasetyo, A. (2025). Pancasila and Technogeopolitics: Integrating National Values into Foreign and Technology Policy. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(2), 234-252. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i2.848>

Sadiyatunnimah, S., & Purba, M. B. (2025). Patriarchal culture and the challenges of women's political representation in Bali: a social, economic, and political analysis of Bali legislative election. *Journal of Social Political Sciences*, 6(4), 327-345.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tong, R. (2018). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (4 (ed.)). Westview Press.

Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Basil Blackwell.

Way, A. C. (2022). Women's Empowerment and Its Link to Political Transformation in Southeast Asia. *Asian Journal of Political Science*, 30(2), 120–140.

Whipkey, S., Ahmed, R., & Thompson, C. (2025). Governance Feminism and Gender Mainstreaming: Rethinking Power in Public Institutions. *Gender, Work & Organization*, 32(1), 45–61.

Yunazwardi, M. I., & Ikawati, E. (2025). THE DYNAMICS OF IMPLEMENTING INTERNATIONAL NORMS ON THE ELIMINATION OF SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 27(1), 103-128.
<https://doi.org/10.7454/global.v27i1.1415>